

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.2 Kesimpulan

Dari penjelasan pada bab – bab sebelumnya bahwasannya kerja sama *Sister City* Bandung –Seoul ini sebetulnya hanya aktif dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Namun, kerja sama ini menghasilkan hasil yang cukup memuaskan. Khususnya di bidang ekonomi perkotaan. Dalam melakukan programnya, tercapai beberapa hal yang memang di awal penelitian menjadi concern yakni pelayanan pajak. Yang akar permasalahannya berupa dari sumber daya manusia yang ada di BAPENDA Kota Bandung. Dari semua proses dan hambatan yang menyebabkan tertundanya maksimalitas kerja sama. Di tahun ini Bagian Kerja sama Bandung memutuskan untuk memperbarui MoU dan melakukan kerja sama di bidang lain yang sebelumnya belum terlaksana dan belum optimal.

Inisiasi kerja sama *Sister City* Pemerintah Kota Metropolitan Seoul dan Pemerintah Kota Bandung yang diawalnya diinisiasikan oleh kunjungan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menemui Walikota Seoul Park Won Soon pada tahun 2014 merupakan suatu keputusan kebijakan kerja sama yang tepat. Sebabnya, Pemerintah Kota Metropolitan Seoul merupakan kota maju yang telah berhasil melakukan pembangunan di berbagai bidang yang menjadikan Pemerintah Kota Seoul saat ini dapat dikatakan sebagai Kota Pintar. Hal ini dapat memberikan banyak keuntungan bagi kota Bandung berupa masukan pengalaman dan bantuan pembangunan dari Pemerintah Kota Seoul yang telah berhasil menerapkan Kota Pintar dimana Kota Bandung pun masih membutuhkan banyak pembangunan di berbagai bidang. Oleh karena itu, kerjasama yang baik antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Seoul penting untuk dibangun. Ini akan membuka peluang bagi kota Bandung untuk meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan pembangunan yang lebih maju.

Kerja sama Bandung dan Seoul ini memiliki beberapa hal yang masih belum dan akan dilaksanakan di waktu yang akan datang. Terdapat pula hambatan dalam melakukan kerja sama. Salah satunya perbedaan pemahaman dalam hal kerangka

kerja sama dan anggaran. Dalam bidang ekonomi perkotaan sendiri, ditemukan bahwasannya kerja sama di bidang ekonomi perkotaan khususnya pengembangan sumber daya manusia dilakukan demi percepatan dan terlaksananya Bandung *Smart city*. Yang merupakan bentuk dari implementasi kerja sama di bidang e-governance. Dalam pelaksanaan program itu, tentunya diperlukan sumber daya manusia yang memadai. Maka dari itu, kota Bandung melakukan pertukaran karyawan dan pelatihan bagi karyawan. Serta, dilakukan pula pertukaran informasi untuk pelaksanaan sistem pajak dan e-governance. Dengan adanya pertukaran dan kegiatan – kegiatan ini, terealisasi peningkatan pajak dan persentase realisasi pajak kota Bandung yang dapat dirasakan oleh masyarakat kota Bandung.

Walaupun terdapat kendala – kendala dalam pelaksanaannya. Kerja sama ini terhitung cukup baik dalam pelaksanaannya. Ini dikarenakan adanya perhitungan dan penyampaian yang baik dari personel yang mengikuti program pengembangan kapasitas tersebut. Sehingga, untuk pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia ini menghasilkan hasil yang baik. Dilihat dari adanya peningkatan pendapatan dan realisasi untuk penggunaan untuk kepentingan masyarakat yang juga meningkat di setiap tahunnya dibandingkan dengan tahun dimana kerja sama belum dilaksanakan. Penggunaan pendapatan daerah untuk kepentingan masyarakat ini juga menyebabkan adanya respon kepuasan pelayanan yang baik bagi Bapenda kota Bandung.

## 6.2 Saran

Peneliti menyarankan untuk akademisi lain melakukan penelitian mengenai kerja sama *Sister City* ini karena selain kerja sama ini merupakan kerja sama yang aktif, tetapi juga masih banyak bidang lain yang masih memiliki kekosongan penelitian. Selain itu dalam pencarian data untuk penelitian juga sangat didukung oleh Bagian Kerjasama Pemerintah Kota Bandung yang akan memudahkan akademisi lain untuk melakukan penelitian.

Kerjasama di bidang peningkatan sumber daya manusia yang tujuannya untuk peningkatan pendapatan daerah ini dilakukan untuk menghasilkan hasil yang sesuai harapan kerja sama, tetapi hal itu sulit dicapai apabila kedua kota yang

terlibat tidak memiliki komitmen yang bulat dalam pelaksanaan kerja sama. Peneliti menyarankan bagi kedua pemerintah kota untuk lebih memberikan komitmen dan perhatiannya terhadap kerja sama ini agar dilakukan lebih aktif lagi karna sebenarnya kerja sama ini bisa dilakukan karna keduanya sudah memiliki sumber daya yang cukup memadai.

Kurangnya komitmen dari kedua aktor ini dipengaruhi oleh aturan dalam implementasi kerja sama yang tidak jelas dan bersifat dinamis pada Memorandum of Understanding ataupun Letter of Intent kerja sama tersebut yang membuat kurang jelasnya framework kerja sama yang mengatur bidang-bidang mana saja yang ingin dikerja samakan, pihak-pihak yang terlibat, dan terutama hasil konkrit yang ingin dicapai.

Dalam upaya pengoptimalan kerja sama juga dibutuhkan dana yang besar. Penulis menyarankan agar kedua kota saling berpartisipasi menyiapkan dana dengan menarik investor swasta dari masing-masing kota ataupun dengan dana pembangunan daerahnya. Sebab dana pembangunan infrastruktur dan aplikasi ini dapat menjadi investasi masa depan bagi pengurangan pengeluaran dalam pelayanan pemerintahan di Kota Bandung.